

# BAB I

## AKUNTANSI SYARIAH

### A. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat didefinisikan dari 2 kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. *Committee on Accounting Terminology* dari *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* mendefinisikan bahwa Akuntansi ialah seni dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum aktivitas serta transaksi yang berhubungan dengan finansial dalam wujud satuan uang melalui teknik yang mendayagunakan, serta melalui proses tersebut hasilnya diinterpretasikan.<sup>1</sup>

Sedangkan kata Syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang ketetapannya diatur oleh Allah SWT agar manusia mematuhiinya dalam melaksanakan setiap kegiatan selama hidupnya di muka bumi.<sup>2</sup>

Dari makna akuntansi dan syariah di atas dapat diambil konklusi bahwa akuntansi syariah yakni suatu tahapan kegiatan mulai dari mencatat transaksi sampai dengan melaporkan informasi keuangan suatu entitas dengan berpedoman pada al-Quran.

### B. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Dalam akuntansi syariah, asumsi dasar yang digunakan sama dengan akuntansi pada umumnya, yakni *accrual basis* atau dasar akrual dan *going concern* atau asumsi keberlangsungan usaha.<sup>3</sup>

Pada asumsi keberlangsungan usaha, dalam menyusun pelaporan keuangan, entitas akan mengasumsikan bahwa usaha yang dimaksud bisa senantiasa berjalan hingga waktu yang akan datang. Sehingga dapat diartikan bahwa entitas syariah tidak memiliki keinginan untuk mengurangi skala bisnisnya dari segi materi ataupun menerapkan likuidasi.

Sedangkan asumsi dasar akrual, mengasumsikan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, beban, pendapatan, ekuitas, kewajiban,

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal.15.

<sup>2</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal.2.

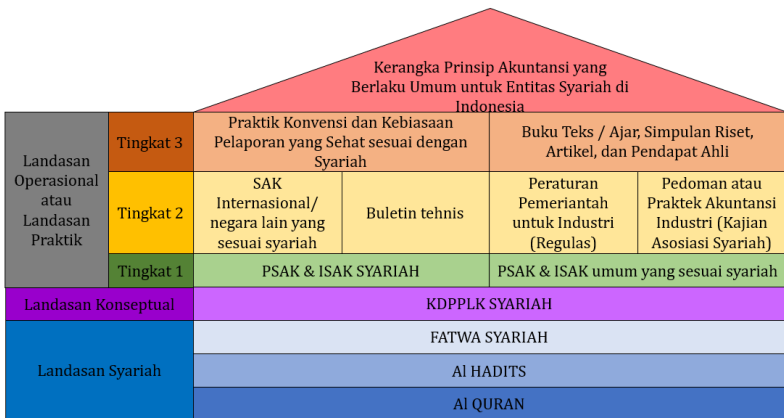
<sup>3</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal.23.

dan aset dilakukan pengakuan ketika peristiwa terjadi, bukan ketika setara kas atau kas diterima dan dicatat serta disajikan dilaporan keuangan. Atas dasar yang demikian, maka pengakuan atas transaksi maupun aktivitas keuangan lainnya dilaksanakan ketika peristiwanya kejadian (bukan ketika terjadi penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas) yang kemudian dicatatkan dan dilakukan pelaporan pada periode yang bersangkutan. Penerapan basis akrual pada penyusunan laporan keuangan menginformasikan bahwa pengguna tidak hanya bertransaksi dengan kejadian di masa lalu, tetapi juga bertransaksi dengan masa depan, dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dalam membayar kas yang sumber dayanya akan diterima pada waktu mendatang,

### C. Bangun Prinsip Akuntansi Syariah

Penanganan suatu transaksi dalam akuntansi Syariah harus diproses sebagaimana prinsip akuntansi Syariah yang berlaku. Akuntansi syariah di Indonesia menganut bangun umum sebagaimana berikut ini:<sup>4</sup>

**Gambar 1.1**  
Bangun Prinsip Akuntansi Syariah



Kerangka diatas menggambarkan bangunan yang tiap-tiap lapisan di bawahnya berperan sebagai pondasi untuk lapisan yang ada

<sup>4</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal.20.

di atasnya. Pondasi paling pokok bagi akuntansi syariah ialah al-Quran, Hadits, serta fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berkenaan dengan hal tersebut maka semua ketetapan akuntansi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah harus dilarang penggunaannya.

#### **D. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Syariah**

Informasi yang diperoleh dari hasil pemrosesan akuntansi yang telah dilakukan yang kemudian dapat digunakan oleh pengguna akuntansi dalam proses pengambilan keputusan diistilahkan sebagai laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa akuntansi syariah menaati prinsip yang berbeda dengan akuntansi konvensional, maka laporan keuangan yang dihasilkannya pun juga berbeda.

Entitas yang menganut prinsip Syariah akan menghasilkan laporan keuangan berikut ini:<sup>5</sup>

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca
2. Laporan Arus kas
3. Laporan Laba rugi
4. Laporan Perubahan Modal
5. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah
6. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan (*qardhul hasan*)
7. Laporan Khusus yang mencerminkan kegiatan Entitas Syariah tertentu (investasi terikat)
8. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **E. Pemakai Informasi Akuntansi Syariah**

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh setiap pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pihak yang memakai informasi akuntansi, meliputi sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Penasihat dan investor, membutuhkan informasi akuntansi guna menetapkan pengukuran atas kapasitas entitas syariah untuk menunaikan dividen sehingga mampu menunjang pertimbangan

---

<sup>5</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, hal.34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.22.

haruslah menjual, mempertahankan, atau membeli investasi yang bersangkutan.

2. Pembayar biaya *qardh*, kebutuhan informasi akuntansinya diperlukan dalam memutuskan dana *qardh* apakah bisa dilunasi sesuai masa pelunasannya.
3. Pemilik dana *syirkah*, membutuhkan informasi akuntansi dengan maksud agar dapat diputuskan terkait investasi yang tingkatan labanya yang aman dalam kompetisi.
4. Pihak yang mempunyai anggaran titipan, memerlukan informasi akuntansi dalam memberikan keputusan kemungkinan pengambilan dana titipan sewaktu-waktu.
5. Penyalur dan pihak yang diberi wakaf, sedekah, infak, dan zakat, maka informasi akuntansi diperlukan guna menyediakan data tentang distribusi dan sumber anggaran yang berkaitan.
6. Pengawas syariah, membutuhkan informasi akuntansi guna melakukan pengawasan pada entitas syariah terkait kepatuhannya pada asas yang ditetapkan.
7. Karyawan, membutuhkan informasi akuntansi agar dapat dilakukan penilaian terhadap kapasitas entitas untuk membayarkan imbal jasa, peluang kerja, dan kompensasi pensiun.
8. Pemasok dan mitra bisnis yang lain, membutuhkan informasi akuntansi guna memastikan total terutang dapat terbayar ketika masa pelunasan yang disepakati.
9. Konsumen, membutuhkan informasi akuntansi dalam hal keberlangsungan hidup entitas Syariah.
10. Pemerintah, memerlukan informasi akuntansi guna mengendalikan kegiatan entitas syariah dan memutuskan pengaturan pajak sebagai landasan dalam merancang grafik penghasilan nasional serta statistik yang lain.
11. Masyarakat, membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu masyarakat memaparkan tren informasi dan pembaruan terbaru kesejahteraan entitas syariah beserta kegiatan-kegiatannya.